JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)
Vol.3, No.12 Desember 2025
e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX
PT. Media Akademik Publisher
AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

MEMBANDINGKAN SISTEM PENDIDIKAN NEGARA MAJU: FINLANDIA, JEPANG, DAN JERMAN

Oleh:

Muhammad Irsandi[1]
Anggun Septia Nurrahmah[2]
Hasby Ash Shiddiqi[3]
Irfan Fauzi[4]

Sekolah Tinggi Agama Islam UISU Pematangsiantar
Alamat: JL. Sangnawaluh Km. 4, 5, Pahlawan, Kec. Siantar Tim., Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara (21136).
Korespondensi Penulis: muhammadirsanfi2803@gmail.com, anggun.orc45@gmail.com, hasbya077@gmail.com, irfan17fauzi17@gmail.com,

Abstract. *This study compares the education systems of three developed countries Finland, Japan, and Germany with the aim of identifying key policy and operational practices that contribute to educational excellence and examining their relevance to the Indonesian context. The research employs a descriptive qualitative approach through library research, drawing upon international reports (e.g., OECD, UNESCO), scholarly articles, reference books, and official national policy documents. The analysis focuses on educational funding policies, curriculum structure, teacher professionalism, evaluation mechanisms, industry involvement (particularly in vocational education), and the role of culture and community in supporting learning. The findings reveal several common patterns among these nations: long-term funding commitments, substantial investment in teacher quality, and the integration of educational technology to enhance learning outcomes. Nonetheless, each country exhibits distinctive characteristics: Finland emphasizes educational equity, teacher autonomy, and a holistic curriculum; Japan prioritizes discipline, character education, and collaborative professional development through lesson study; while Germany excels in its dual vocational education system that closely links schools with industry. The main implication for Indonesia is the need to*

Received November 07, 2025; Revised November 18, 2025; December 03, 2025
*Corresponding author: *muhammadirsanfi2803@gmail.com*

strengthen teacher professionalism, ensure stable educational funding, develop integrated vocational pathways, and adapt educational policies to local cultural contexts. Future research is recommended to empirically examine the adaptation and implementation of such policies at the regional level.
Keywords: *Finland, Japan, Germany, Education System, Comparative Education, Vocational Education.*

Abstrak. Penelitian ini membandingkan sistem pendidikan tiga negara maju Finlandia, Jepang, dan Jerman dengan tujuan mengidentifikasi praktik kebijakan dan operasional yang berkontribusi pada mutu pendidikan serta menilai relevansinya untuk konteks Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, menelaah laporan internasional (mis. OECD, UNESCO), artikel ilmiah, buku referensi, dan dokumen kebijakan nasional terkini. Fokus analisis meliputi kebijakan pendanaan, struktur kurikulum, profesionalisme dan peran guru, mekanisme evaluasi, keterlibatan industri (terutama pada pendidikan vokasional), serta peran budaya dan masyarakat dalam mendukung proses belajar. Hasil kajian menunjukkan pola bersama: komitmen pendanaan jangka panjang, investasi signifikan pada kualitas guru, dan pemanfaatan teknologi pendidikan sebagai pendukung pembelajaran. Namun setiap negara memiliki kekhasan: Finlandia menonjolkan pemerataan akses, otonomi guru, dan kurikulum holistik; Jepang menekankan disiplin, pendidikan karakter, dan praktik kolaboratif antar-guru *(lesson study);* sedangkan Jerman unggul pada sistem pendidikan vokasional ganda *(dual system)* dan keterkaitan erat antara sekolah dengan dunia industri. Implikasi utama bagi Indonesia adalah pentingnya penguatan profesionalisme guru, stabilitas pendanaan, pengembangan jalur vokasional yang terintegrasi dengan industri, serta penyesuaian kebijakan yang sensitif terhadap konteks budaya lokal. Rekomendasi penelitian lanjutan mencakup studi empiris implementasi adaptasi kebijakan di tingkat daerah.
Kata Kunci: Finlandia, Jepang, Jerman, Sistem Pendidikan, Perbandingan Pendidikan, Pendidikan Vokasional.

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban dan kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, sebuah negara mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan global. Dalam era globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, sistem pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter, pengembangan kreativitas, serta peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif. Negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan Jerman telah lama menjadi rujukan dalam studi perbandingan pendidikan karena keberhasilan mereka dalam menciptakan sistem pendidikan yang efisien, inklusif, dan berorientasi pada mutu.

Pendidikan di negara maju secara umum menunjukkan adanya keselarasan antara kebijakan pemerintah, profesionalisme tenaga pendidik, serta budaya belajar masyarakat. Pemerintah berperan sebagai pengarah utama kebijakan strategis, menyediakan pendanaan berkelanjutan, dan memastikan pemerataan akses pendidikan tanpa diskriminasi sosial atau ekonomi. Guru diposisikan sebagai aktor profesional dengan otonomi tinggi dalam proses pembelajaran, sementara masyarakat menempatkan pendidikan sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Menurut Rahman, keberhasilan sistem pendidikan di negara maju tidak terlepas dari stabilitas kebijakan, pendanaan jangka panjang, dan sistem evaluasi yang transparan serta akuntabel.[1]

Finlandia, misalnya, menempatkan prinsip kesetaraan dan kesejahteraan siswa sebagai inti dari sistem pendidikan. Negara ini tidak mengenal ujian nasional berstandar tinggi seperti di banyak negara lain, tetapi menekankan pendekatan formatif dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru di Finlandia memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan diberi kepercayaan penuh untuk mengelola kurikulum sesuai kebutuhan siswa.[2] Jepang, di sisi lain, dikenal dengan budaya disiplin dan pendidikan karakter yang kuat. Sistemnya mengintegrasikan nilai moral (*dotoku*) ke dalam kurikulum, menanamkan etos kerja, tanggung jawab sosial, serta kolaborasi dalam pembelajaran melalui praktik *lesson study*.

---

[1]Adi Rahman, *Perbandingan Sistem Pendidikan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 44.
[2]Siti Destriani, "Sistem Pendidikan di Finlandia dan Relevansinya Bagi Indonesia." Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 10, No. 2 (2021): 145–156.

Sementara itu, Jerman menonjol dengan sistem pendidikan vokasional ganda (*dual system*) yang menggabungkan pendidikan sekolah dengan pelatihan kerja di industri. Model ini memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman praktis secara langsung di dunia kerja, sehingga menghasilkan tenaga profesional yang siap pakai. Pendekatan tersebut dinilai efektif dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional. Sistem ini juga menunjukkan adanya sinergi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam membentuk tenaga kerja terampil yang relevan dengan kebutuhan pasar.

Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan dalam sektor pendidikan, seperti ketimpangan kualitas antarwilayah, rendahnya kompetensi guru, dan keterbatasan fasilitas belajar. Oleh karena itu, melakukan studi perbandingan terhadap negara-negara maju menjadi langkah strategis untuk menemukan inspirasi kebijakan yang dapat diadaptasi sesuai konteks lokal. Melalui penelitian ini, penulis berupaya menganalisis sistem pendidikan Finlandia, Jepang, dan Jerman secara komprehensif guna mengidentifikasi faktor keberhasilan utama, pola kebijakan, serta praktik pendidikan yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan sistem pendidikan nasional.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki beberapa tujuan pokok: (1) mendeskripsikan karakteristik sistem pendidikan di Finlandia, Jepang, dan Jerman; (2) membandingkan kebijakan, kurikulum, dan pendekatan pembelajaran yang digunakan; serta (3) merumuskan pelajaran penting yang relevan bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan teoretis mengenai perbandingan sistem pendidikan, tetapi juga menjadi dasar empiris dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka *(library research).* Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis dan perbandingan sistem pendidikan di tiga negara maju Finlandia, Jepang, dan Jerman melalui telaah terhadap sumber-sumber sekunder yang kredibel. Data dikumpulkan dari berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan resmi lembaga internasional (OECD, UNESCO, dan World Bank), serta dokumen kebijakan pendidikan

nasional dari ketiga negara. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri publikasi akademik menggunakan basis data seperti Google Scholar, Scopus, dan ResearchGate, dengan kata kunci *education system*, *comparative education*, *teacher quality*, dan *vocational training*. Setiap sumber dipilih berdasarkan tingkat relevansi, validitas ilmiah, dan kebaruannya dalam sepuluh tahun terakhir, kecuali untuk referensi teoritis klasik yang dianggap penting dalam mendukung kerangka konseptual penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi *(content analysis)* yang melibatkan proses pengorganisasian informasi ke dalam tema-tema utama seperti kebijakan pendidikan, kurikulum, kualitas tenaga pendidik, dan budaya belajar masyarakat. Setelah itu, dilakukan perbandingan antarnegara untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan keunikan masing-masing sistem pendidikan. Validitas hasil analisis dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan informasi dari beberapa referensi yang berbeda namun membahas topik yang sama, guna memastikan keakuratan interpretasi. Hasil penelitian bersifat interpretatif dan analitis, dengan tujuan memberikan gambaran komprehensif yang dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan atau kajian lanjutan mengenai pengembangan sistem pendidikan di Indonesia.[3].

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Finlandia

Sistem pendidikan Finlandia dikenal di seluruh dunia sebagai salah satu yang paling inklusif, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan peserta didik. Prinsip dasar yang dianut negara ini adalah bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi sosial atau ekonomi. Pemerintah Finlandia memandang pendidikan sebagai hak universal, bukan komoditas. Oleh karena itu, seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah hingga pendidikan tinggi, sebagian besar disubsidi penuh oleh negara. Ciri khas lain dari sistem ini adalah tidak adanya ujian nasional berisiko tinggi; penilaian siswa dilakukan oleh guru di sekolah masing-masing dengan pendekatan formatif dan holistik. Pendekatan ini membangun lingkungan belajar yang bebas tekanan dan menumbuhkan motivasi intrinsik siswa untuk belajar sepanjang hayat.[4]

---

[3]Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 244.
[4]Siti Destriani, Op. Cit., 145-156.

Kebijakan kurikulum Finlandia berlandaskan prinsip "trust-based professionalism", yaitu memberi kepercayaan penuh kepada guru untuk menafsirkan dan menerapkan kurikulum sesuai kebutuhan lokal dan karakter siswa. Kurikulum nasional hanya berfungsi sebagai kerangka umum yang menetapkan kompetensi inti, nilai-nilai kemanusiaan, serta keterampilan abad ke-21 seperti literasi digital, kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis. Reformasi kurikulum terbaru pada tahun 2016 menekankan pembelajaran tematik lintas disiplin (*phenomenon-based learning*) yang mendorong siswa mengaitkan teori dengan realitas kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memperkuat peran sekolah sebagai ruang tumbuhnya pemikiran reflektif dan inovatif di kalangan peserta didik.[5]

Guru merupakan pilar utama keberhasilan pendidikan Finlandia. Semua guru diwajibkan memiliki kualifikasi minimal magister (S2) dan mengikuti program pendidikan guru berbasis riset di universitas. Proses seleksi calon guru sangat ketat, hanya sekitar 10% pelamar yang diterima setiap tahun. Guru dipandang bukan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi sebagai perancang proses pembelajaran. Mereka memiliki otonomi profesional yang tinggi, kebebasan dalam memilih metode pengajaran, serta tanggung jawab penuh terhadap penilaian siswa. Otonomi ini menciptakan rasa tanggung jawab moral dan profesional yang kuat, menjadikan guru Finlandia sebagai figur yang sangat dihormati dalam masyarakat.

Selain itu, sistem pendidikan Finlandia menempatkan kesejahteraan dan keseimbangan kehidupan siswa sebagai prioritas utama. Sekolah tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada dukungan emosional, sosial, dan psikologis. Pemerintah menyediakan layanan konseling, psikolog sekolah, makan siang gratis, serta program inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus. Waktu belajar yang tidak terlalu padat memberi ruang bagi anak-anak untuk beristirahat, bermain, dan mengembangkan minat di luar akademik. Hasilnya, meskipun jam belajar relatif lebih sedikit dibanding banyak negara lain, siswa Finlandia tetap mencatatkan kinerja tinggi dalam berbagai survei internasional seperti PISA *(Programme for International Student Assessment).*[6]

[5]Erja Vitikka, "The Finnish National Core Curriculum: Structure, Values, and Implementation." *European Journal of Curriculum Studies*, Vol. 9, No. 1 (2019): 22–36.
[6]Adi Rahman, Op. Cit., 88-94.

Secara keseluruhan, keberhasilan pendidikan Finlandia merupakan hasil dari kombinasi antara kebijakan nasional yang stabil, profesionalisme guru yang kuat, dan budaya masyarakat yang menghargai pendidikan sebagai investasi sosial jangka panjang. Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada sekolah dan guru, sementara masyarakat mendukung peran mereka secara aktif. Tantangan yang kini dihadapi Finlandia adalah mempertahankan kualitas pendidikan di tengah perubahan global, digitalisasi, dan keberagaman budaya yang semakin meningkat. Namun, prinsip dasar yang dipegang kepercayaan, kesetaraan, dan kemanusiaan tetap menjadi fondasi kokoh yang membuat sistem pendidikan Finlandia terus relevan dan menjadi inspirasi bagi banyak negara, termasuk Indonesia.

B. Jepang

Sistem pendidikan Jepang dikenal sebagai salah satu yang paling disiplin, terorganisasi, dan berorientasi pada pembentukan karakter di dunia. Pendidikan di Jepang berperan penting dalam membentuk masyarakat yang mandiri, pekerja keras, dan menghargai nilai-nilai sosial. Pemerintah Jepang, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi (MEXT), mengatur seluruh aspek pendidikan mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, hingga evaluasi. Struktur pendidikan terdiri atas pendidikan dasar enam tahun, menengah pertama tiga tahun, dan menengah atas tiga tahun, dengan tingkat partisipasi hampir 100%. Sistem ini menekankan keseimbangan antara kemampuan akademik dan moral, sehingga pendidikan dipandang bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan watak dan disiplin.[7]

Kurikulum nasional Jepang bersifat terpusat namun dinamis, dirancang oleh MEXT melalui dokumen *Courses of Study* yang diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Salah satu komponen terpenting adalah pendidikan moral (*dōtoku*) yang bertujuan menanamkan nilai-nilai tanggung jawab sosial, rasa hormat, kerja sama, dan integritas. Selain mata pelajaran akademik seperti sains dan matematika, sekolah juga memberikan waktu khusus untuk kegiatan moral, praktik kebersihan, serta kerja kelompok, yang menjadi bagian integral dari pendidikan karakter.

[7]Rachmat Hidayat, "Pendidikan Dasar Wajib di Jepang: Struktur dan Kebijakan." *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 3 (2020): 201–213.

Kurikulum ini mencerminkan filosofi hidup masyarakat Jepang yang mengutamakan harmoni (*wa*), keteraturan, dan dedikasi terhadap tugas.

Salah satu inovasi pedagogis yang paling terkenal di Jepang adalah Lesson Study *(Jugyō Kenkyū),* yaitu model peningkatan profesionalisme guru melalui kolaborasi dan refleksi bersama. Dalam praktik ini, guru merancang pelajaran secara kolektif, mengamati pelaksanaan oleh rekan sejawat, dan mendiskusikan hasilnya untuk perbaikan. Lesson Study menjadikan sekolah sebagai komunitas belajar profesional dan menciptakan budaya pengajaran yang berkelanjutan. Pendekatan ini juga berhasil diadaptasi di banyak negara lain karena efektivitasnya dalam memperbaiki mutu pembelajaran dan mendorong guru untuk terus bereksperimen secara ilmiah dalam praktik kelas.[8]

Dalam konteks sosial, pendidikan Jepang didukung oleh budaya masyarakat yang menjunjung tinggi etos kerja, kebersamaan, dan tanggung jawab. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar akademik, tetapi juga sebagai ruang sosialisasi nilai-nilai kehidupan. Siswa membersihkan kelas, menjaga ketertiban, dan terlibat dalam kegiatan kolektif seperti klub sekolah (*bukatsu*), yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin. Selain itu, dukungan keluarga dan komunitas terhadap pendidikan sangat kuat; orang tua secara aktif memantau kemajuan anak-anak mereka, sementara sekolah berperan sebagai perpanjangan dari keluarga dalam mendidik karakter.

Secara keseluruhan, sistem pendidikan Jepang menonjol karena kemampuannya mengintegrasikan pendidikan akademik, moral, dan sosial secara seimbang. Guru dipandang sebagai agen pembentuk nilai, bukan hanya penyampai pelajaran. Namun demikian, Jepang juga menghadapi tantangan seperti tekanan akademik yang tinggi, kesenjangan antara jalur akademik dan vokasional, serta kebutuhan untuk memperkuat kreativitas dalam menghadapi era digital. Meski begitu, nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan kolaborasi yang tertanam dalam sistem pendidikan Jepang telah menjadi kekuatan utama yang menjadikan negara ini sebagai salah satu contoh paling sukses dalam membangun masyarakat yang berkarakter, kompeten, dan berdaya saing global.

C. Jerman

[8]Muhammad Nurhadi, "Lesson Study dalam Sistem Pendidikan Jepang." *Jurnal Pendidikan Guru*, Vol. 12, No. 1 (2021): 55–66.

Sistem pendidikan Jerman merupakan salah satu yang paling terstruktur dan berhasil di dunia, dengan kekhasan pada pendidikan vokasional ganda *(dual system)* yang memadukan pembelajaran di sekolah dan pelatihan di dunia industri. Sistem ini dianggap sebagai model ideal untuk menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Struktur pendidikan di Jerman bersifat desentralisasi, di mana tanggung jawab utama berada pada pemerintah negara bagian (*Länder*), sementara pemerintah federal berperan dalam menetapkan kerangka kebijakan umum dan mendukung proyek strategis nasional. Pendekatan ini memastikan adanya keseimbangan antara keseragaman standar dan fleksibilitas lokal sesuai kebutuhan masyarakat masing-masing daerah.

Sejak usia dini, sistem pendidikan Jerman dirancang untuk mengarahkan siswa ke jalur pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Setelah empat tahun pendidikan dasar (*Grundschule*), siswa melanjutkan ke salah satu dari tiga jalur utama: *Hauptschule*, *Realschule*, atau *Gymnasium*. Jalur *Gymnasium* berorientasi pada pendidikan akademik menuju universitas, sedangkan *Realschule* dan *Hauptschule* lebih fokus pada pelatihan teknis dan kejuruan. Meskipun sistem ini memungkinkan diferensiasi yang efisien, beberapa kalangan menilai bahwa pemisahan terlalu dini dapat memperkuat perbedaan sosial-ekonomi, sehingga sejumlah reformasi kini dilakukan untuk memperpanjang masa pendidikan bersama sebelum diferensiasi jalur.[9]

Kelebihan paling menonjol dari Jerman adalah efektivitas pendidikan vokasionalnya *(Berufsausbildung)* yang menjadi bagian inti dari sistem *dual system*. Siswa yang memilih jalur vokasional akan menghabiskan sekitar 60–70% waktu belajar di perusahaan untuk pelatihan praktik dan sisanya di sekolah kejuruan (*Berufsschule*) untuk teori. Pemerintah, industri, dan kamar dagang bekerja sama dalam menentukan kurikulum, memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan relevan dengan kebutuhan ekonomi modern. Keberhasilan model ini terlihat dari rendahnya tingkat pengangguran remaja dan tingginya transisi lulusan ke dunia kerja.

Selain vokasional, Jerman juga memiliki sistem pendidikan tinggi yang kuat, terdiri atas *Universität* yang berfokus pada riset teoretis dan *Fachhochschule* (universitas ilmu terapan) yang menekankan penerapan praktis. Pemerintah mendukung universitas melalui program *Excellence Initiative* dan investasi pada riset teknologi, inovasi industri,

[9]Marcus Kuhl, "Early Tracking and Educational Inequality in Germany." *European Journal of Education Studies*, Vol. 8, No. 4 (2021): 112–125.

serta program internasionalisasi. Pendidikan tinggi di Jerman relatif bebas biaya, mencerminkan filosofi bahwa pendidikan merupakan hak publik, bukan barang dagangan. Kualitas dan reputasi universitas Jerman dalam bidang teknik, kedokteran, dan sains telah menjadikannya destinasi pendidikan global yang kompetitif.[10]

Secara keseluruhan, sistem pendidikan Jerman menunjukkan keseimbangan antara akademik, praktik, dan relevansi industri. Pemerintah menjaga kesinambungan kebijakan melalui kolaborasi antara sektor publik dan swasta, sementara masyarakat menganggap pendidikan sebagai tanggung jawab kolektif. Tantangan utama yang dihadapi saat ini meliputi kesenjangan antar-*Länder*, integrasi siswa migran, serta kebutuhan penyesuaian kurikulum terhadap digitalisasi dan ekonomi hijau. Namun, kekuatan Jerman terletak pada kemampuannya mempertahankan sistem pendidikan yang fleksibel, berkualitas tinggi, dan relevan secara ekonomi, menjadikannya salah satu model terbaik dalam menghubungkan pendidikan dengan produktivitas nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perbandingan sistem pendidikan di tiga negara maju Finlandia, Jepang, dan Jerman menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan hasil dari sinergi kebijakan jangka panjang, profesionalisme tenaga pendidik, budaya belajar masyarakat, serta dukungan pemerintah yang konsisten. Meskipun ketiganya memiliki pendekatan yang berbeda, terdapat benang merah yang sama: pendidikan dipandang bukan sekadar proses akademik, melainkan investasi strategis dalam membangun kualitas manusia dan daya saing bangsa.

Finlandia menonjol sebagai model pendidikan yang berorientasi pada kesetaraan dan kesejahteraan siswa. Sistem ini menempatkan guru sebagai pusat profesionalisme dengan kualifikasi tinggi, menghindari tekanan ujian nasional, dan menerapkan kurikulum holistik yang fleksibel. Keberhasilan Finlandia lahir dari kepercayaan yang besar terhadap guru dan komitmen untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan belajar yang sama tanpa tekanan kompetitif berlebihan. Pendekatan yang menekankan

[10]Thomas Deissinger, *Germany's Dual System of Vocational Education and Training: Challenges and Reforms*. (Stuttgart: University of Konstanz Press, 2020).

kesejahteraan emosional, kemandirian, serta tanggung jawab sosial ini menciptakan lingkungan belajar yang humanis dan efektif.

Berbeda dengan Finlandia, Jepang menonjol dalam hal disiplin, etos kerja, dan pendidikan karakter. Kurikulum nasionalnya dirancang secara terpusat untuk memastikan standar yang merata di seluruh negeri, namun tetap memberi ruang bagi sekolah untuk berinovasi. Melalui *lesson study*, Jepang berhasil membangun budaya kolaboratif di antara para guru, yang menjadikan sekolah sebagai komunitas belajar profesional. Pendidikan moral (*dōtoku*), kebersihan, dan tanggung jawab sosial bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian integral dari pembentukan karakter siswa. Sistem ini menunjukkan bahwa keberhasilan akademik dapat berjalan seiring dengan pembinaan etika dan nilai-nilai sosial yang kuat.

Sementara itu, Jerman menjadi contoh sukses dalam penerapan pendidikan vokasional yang relevan dengan dunia kerja melalui sistem ganda (*dual system*). Sinergi antara sekolah, industri, dan pemerintah menjadikan lulusan pendidikan vokasional Jerman memiliki keterampilan praktis yang tinggi dan mudah terserap di pasar kerja. Struktur pendidikan yang fleksibel memberi jalur berbeda sesuai kemampuan dan minat siswa, sementara kebijakan desentralisasi memberi ruang adaptasi di setiap *Länder*. Profesionalisme guru yang tinggi serta keterlibatan industri secara langsung dalam penyusunan kurikulum menjadikan sistem ini efektif dan adaptif terhadap perubahan ekonomi global.

Dari ketiga negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berkualitas harus memiliki keseimbangan antara kebijakan nasional yang kuat dan pelaksanaan yang adaptif di tingkat lokal, antara penguasaan akademik dan pembentukan karakter, serta antara teori dan keterampilan praktis. Finlandia mengajarkan pentingnya kepercayaan terhadap guru dan pemerataan kesempatan; Jepang menekankan pentingnya disiplin, kolaborasi, dan moralitas; sementara Jerman menunjukkan kekuatan integrasi pendidikan dengan dunia kerja. Semua ini menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk membangun sistem pendidikan yang tidak hanya mengejar skor akademik, tetapi juga menumbuhkan manusia yang berkarakter, kreatif, dan produktif.

Saran

Indonesia perlu memperkuat profesionalisme guru dengan mencontoh standar tinggi Finlandia, sekaligus mengintegrasikan pendidikan karakter dan budaya disiplin seperti di Jepang dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Selain itu, pengembangan pendidikan vokasional berbasis kemitraan industri perlu diprioritaskan sebagaimana diterapkan dalam sistem ganda Jerman, agar lulusan lebih siap menghadapi dunia kerja. Pemerintah juga harus menjaga stabilitas kebijakan dan pemerataan sumber daya pendidikan, sehingga adaptasi praktik-praktik terbaik dari negara maju dapat diterapkan secara efektif sesuai konteks lokal di berbagai daerah.

DAFTAR REFERENSI

Deissinger, T. (2020). *Germany's Dual System of Vocational Education and Training: Challenges and Reforms.* Stuttgart: University of Konstanz Press.

Destriani, S. (2021). "Sistem Pendidikan di Finlandia dan Relevansinya Bagi Indonesia.". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 145–156.

Hidayat, R. (2020). "Pendidikan Dasar Wajib di Jepang: Struktur dan Kebijakan.". *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 201–213.

Kuhl, M. (2021). "Early Tracking and Educational Inequality in Germany.". *European Journal of Education Studies*, 112–125.

Nurhadi, M. (2021). "Lesson Study dalam Sistem Pendidikan Jepang.". *Jurnal Pendidikan Guru*, 55–66.

Rahman, A. (2020). *Perbandingan Sistem Pendidikan Internasional.* Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Vitikka, E. (2019). "The Finnish National Core Curriculum: Structure, Values, and Implementation.". *European Journal of Curriculum Studies*, 22–36.